



# RANCANGAN AKHIR **RENJA 2026**

---

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

## KATA PENGANTAR

---

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran dari Renstra Tahun 2025–2029, sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2026.

Penyusunan rancangan akhir Renja ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Selain itu, dokumen ini juga mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang telah berkontribusi dalam penyusunan rancangan akhir Renja ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan bersama dalam mewujudkan sasaran pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Kalimantan Timur



**Drs. Sufian Agus, M.Si.**

**DAFTAR ISI**

---

**KATA PENGANTAR ..... i**

**DAFTAR ISI ..... ii**

**BAB I PENDAHULUAN..... 1**

1.1. Latar Belakang.....1

1.2. Landasan Hukum.....4

1.3. Maksud dan Tujuan .....7

1.4. Sistematika Penulisan .....8

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN ..... 9**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Berjalan .....9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....18

2.3. Isu – Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....19

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.....20

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Pemangku  
Kepentingan .....31

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN .....32**

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....32

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD .....32

3.3. Program dan Kegiatan .....35

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....40**

**BAB V PENUTUP .....50**

## **BAB I      PENDAHULUAN**

---

### **1.1    Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 273 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah diwajibkan menyusun dan memiliki Rencana Kerja (Renja) sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pencapaian target pembangunan tahunan. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rancangan Akhir Renja Tahun 2026 sebagai rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran operasional dari dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029.

Dalam perencanaan pembangunan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi daerah, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam bidang kesatuan bangsa dan politik. Dinamika terkini pasca Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, perkembangan demokratisasi, meningkatnya kompleksitas konflik sosial, serta arus informasi digital yang berimplikasi pada munculnya disinformasi dan polarisasi sosial, menjadi faktor penting yang perlu diantisipasi dalam perencanaan program dan kegiatan tahun 2026.

Proses penyusunan Renja Tahun 2026 didasarkan pada dokumen Renstra 2025–2029 serta memperhatikan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. Dengan demikian, Renja ini tidak hanya memuat prioritas program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, tetapi juga mengedepankan keterpaduan, konsistensi, dan sinergi dengan perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sebagai dokumen rencana tahunan perangkat daerah, Renja SKPD memiliki arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah, karena beberapa hal sebagai berikut:

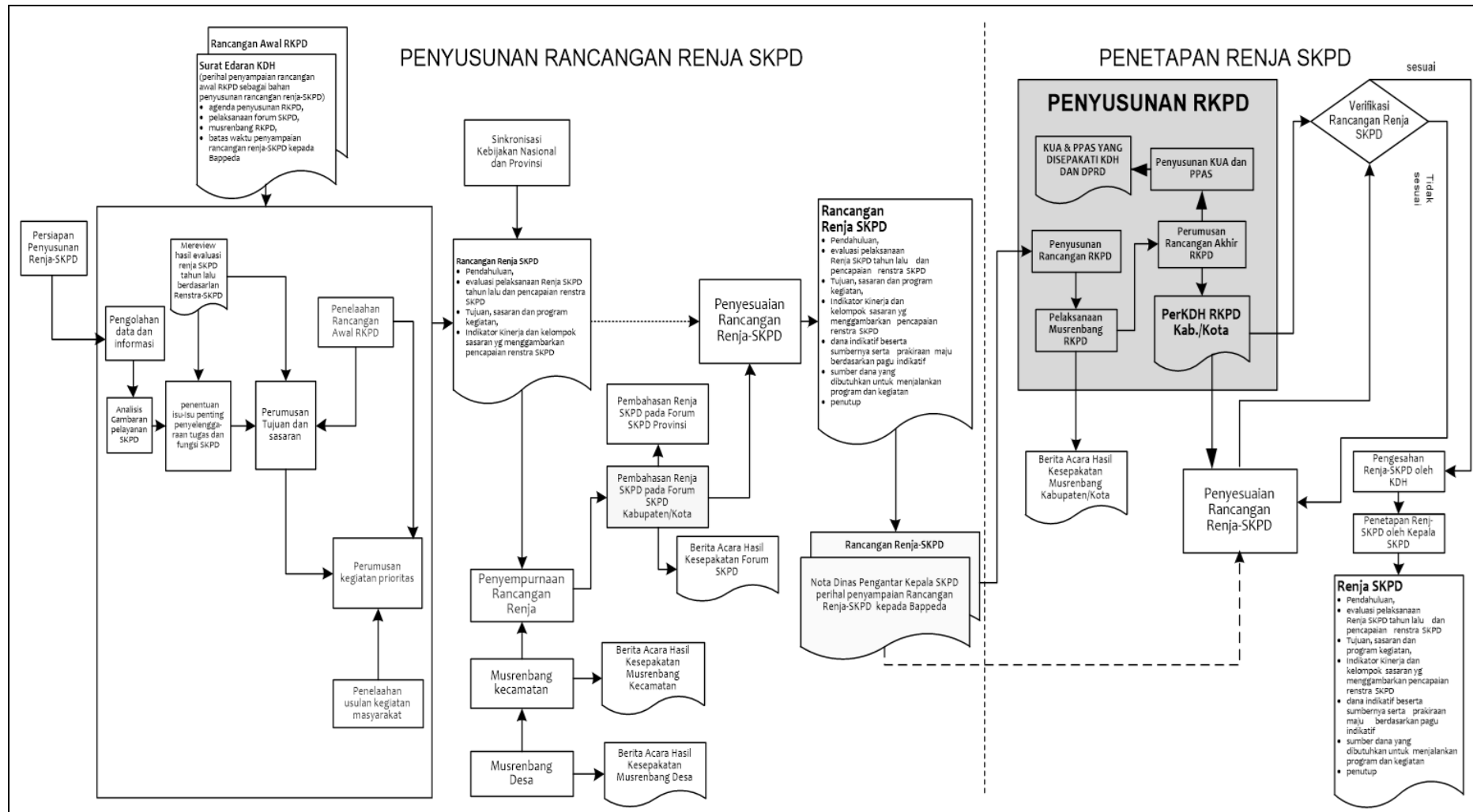
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan sasaran perangkat daerah dalam Renstra, serta mengacu pada arah kebijakan operasional dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.
2. Renja SKPD menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS dan RKA-PD Tahun 2026, sehingga setiap program dan kegiatan yang direncanakan selaras dengan kebijakan fiskal daerah.
3. Renja SKPD merupakan instrumen penting untuk monitoring, evaluasi, dan pengukuran kinerja, sehingga capaian pembangunan dapat dinilai secara kuantitatif maupun kualitatif sesuai target Rencana Kinerja Tahunan.

Mengingat arti strategis tersebut, penyusunan hingga penetapan Rancangan Akhir Renja 2026 wajib mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD; serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Renja Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi pedoman yang jelas, terukur, dan akuntabel bagi seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan, sekaligus mendukung terwujudnya Kalimantan Timur yang aman, tertib, harmonis, dan demokratis.

Adapun bagan alur tahapan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

## ALUR TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA



## **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran SKPD.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
8. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
9. Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
12. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
13. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
14. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

15. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
16. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
25. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;
26. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
28. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
29. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
30. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama;

31. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
32. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Budaya;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tenaga Kerja Asing di Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai - nilai Pancasila;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
52. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
53. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi;
54. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Psikotropika;
55. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah

- Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
56. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren;
  57. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  58. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Timur;
  59. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
  60. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
  61. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman operasional dalam penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025. Hasil evaluasi menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap struktur subkegiatan, indikator kinerja, dan pagu anggaran agar selaras dengan arah kebijakan RKPD 2026, kebijakan fiskal daerah, serta dinamika kebutuhan layanan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk:

1. Menjadi acuan penyesuaian program, kegiatan, subkegiatan, target indikator kinerja, dan pagu anggaran Tahun 2026 pada Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2025.

2. Menjamin keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2026 sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Kesbangpol, serta konsisten dengan Renstra 2025–2029 dan RKPD 2026.
3. Menyediakan instrumen monitoring dan evaluasi yang terukur untuk menilai capaian kinerja Tahun 2026, sebagai dasar pengendalian, perbaikan berkelanjutan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Berjalan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II      EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN**

---

### **2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Berjalan (Triwulan II)**

Pada Tahun 2024 ada 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan yang menjadi garapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur seluruhnya bersifat non fisik, yaitu berupa sosialisasi dan penyuluhan baik itu yang dilaksanakan di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Kalimantan Timur.

Adapun evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.1.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (KINERJA)  
Tahun Anggaran 2025 Triwulan II  
Provinsi Kalimantan Timur

| Kode                   | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                  | Pagu Total     | Realisasi Total | Realisasi Keuangan | Fisik Total |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------|
| 8.01.0.00.0.00.02.0000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                                                                                                                              | 97.309.793.444 | 23.575.451.361  | 24,23              | 71,85       |
| 8.01.02                | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                                                                                                   | 8.313.460.672  | 1.155.078.256   | 13,89              | 27,39       |
| 8.01.02.1.01           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                        | 8.313.460.672  | 1.155.078.256   | 13,89              | 27,39       |
| 8.01.02.1.01.0003      | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                    | 781.538.250    | 92.380.465      | 11,82              | 26,78       |
| 8.01.02.1.01.0005      | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                            | 66.045.616     | 36.170.500      | 54,77              | 57,23       |
| 8.01.02.1.01.0006      | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 126.842.602    | 0               | 0,00               | 0,00        |
| 8.01.02.1.01.0007      | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                    | 127.082.106    | 20.290.000      | 15,97              | 16,52       |
| 8.01.02.1.01.0008      | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka                                                                                                                                                | 1.932.627.842  | 9.520.000       | 0,49               | 1,14        |
| 8.01.02.1.01.0009      | Pelaksanaan tugas Paskibraka                                                                                                                                                                                   | 4.282.421.632  | 375.393.800     | 8,77               | 27,05       |

| Kode              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                         | Pagu Total     | Realisasi Total | Realisasi Keuangan | Fisik Total |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------|
| 8.01.02.1.01.0010 | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                                                                                      | 37.877.000     | 0               | 0,00               | 25,00       |
| 8.01.02.1.01.0011 | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                                                                              | 140.242.602    | 0               | 0,00               | 0,00        |
| 8.01.02.1.01.0012 | Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                                | 818.783.022    | 621.323.491     | 75,88              | 100,00      |
| 8.01.03           | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                                | 64.765.802.131 | 15.572.339.785  | 24,04              | 84,64       |
| 8.01.03.1.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik       | 64.765.802.131 | 15.572.339.785  | 24,04              | 84,64       |
| 8.01.03.1.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                          | 64.465.470.403 | 15.431.818.000  | 23,94              | 84,75       |
| 8.01.03.1.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 300.331.728    | 140.521.785     | 46,79              | 61,73       |
| 8.01.04           | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                                         | 1.102.075.314  | 200.046.887     | 18,15              | 52,53       |

| Kode              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                      | Pagu Total    | Realisasi Total | Realisasi Keuangan | Fisik Total |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------|
| 8.01.04.1.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                 | 1.102.075.314 | 200.046.887     | 18,15              | 52,53       |
| 8.01.04.1.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                              | 1.010.155.728 | 171.925.102     | 17,02              | 53,99       |
| 8.01.04.1.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                      | 91.919.586    | 28.121.785      | 30,59              | 36,44       |
| 8.01.05           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                                           | 685.996.119   | 44.906.907      | 6,55               | 9,40        |
| 8.01.05.1.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                  | 685.996.119   | 44.906.907      | 6,55               | 9,40        |
| 8.01.05.1.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                          | 611.069.937   | 15.603.322      | 2,55               | 4,61        |
| 8.01.05.1.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 74.926.182    | 29.303.585      | 39,11              | 48,48       |
| 8.01.06           | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                         | 2.968.356.425 | 506.036.564     | 17,05              | 23,95       |

| Kode              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                    | Pagu Total     | Realisasi Total | Realisasi Keuangan | Fisik Total |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------|
| 8.01.06.1.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                         | 2.968.356.425  | 506.036.564     | 17,05              | 23,95       |
| 8.01.06.1.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                          | 1.097.419.885  | 208.957.360     | 19,04              | 29,67       |
| 8.01.06.1.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 129.600.000    | 59.301.800      | 45,76              | 37,22       |
| 8.01.06.1.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                            | 1.741.336.540  | 237.777.404     | 13,65              | 19,37       |
| 8.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                            | 19.474.102.783 | 6.097.042.962   | 31,31              | 58,88       |
| 8.01.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                 | 264.519.192    | 3.816.000       | 1,44               | 24,31       |
| 8.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                  | 6.892.808      | 0               | 0,00               | 46,79       |
| 8.01.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                       | 1.521.404      | 0               | 0,00               | 0,00        |
| 8.01.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                               | 1.001.404      | 0               | 0,00               | 0,00        |
| 8.01.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                            | 1.001.404      | 600.000         | 59,92              | 100,00      |

| <b>Kode</b>       | <b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>                                                                                                  | <b>Pagu Total</b> | <b>Realisasi Total</b> | <b>Realisasi Keuangan</b> | <b>Fisik Total</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| 8.01.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                     | 214.194.768       | 3.216.000              | 1,50                      | 28,05              |
| 8.01.01.1.01.0009 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 39.907.404        | 0                      | 0,00                      | 0,00               |
| 8.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                | 12.387.146.530    | 5.142.682.995          | 41,52                     | 56,86              |
| 8.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                     | 11.903.126.874    | 4.933.862.995          | 41,45                     | 57,15              |
| 8.01.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                         | 476.760.000       | 208.820.000            | 43,80                     | 50,00              |
| 8.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                      | 2.888.424         | 0                      | 0,00                      | 0,00               |
| 8.01.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                                 | 741.404           | 0                      | 0,00                      | 52,60              |
| 8.01.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                        | 2.368.424         | 0                      | 0,00                      | 50,00              |
| 8.01.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                        | 1.261.404         | 0                      | 0,00                      | 49,12              |
| 8.01.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                | 183.817.722       | 0                      | 0,00                      | 98,57              |
| 8.01.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                             | 481.404           | 0                      | 0,00                      | 0,00               |
| 8.01.01.1.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                   | 180.370.702       | 0                      | 0,00                      | 99,98              |
| 8.01.01.1.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                     | 1.482.808         | 0                      | 0,00                      | 7,47               |
| 8.01.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                           | 1.482.808         | 0                      | 0,00                      | 50,00              |

| <b>Kode</b>       | <b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>                                   | <b>Pagu Total</b> | <b>Realisasi Total</b> | <b>Realisasi Keuangan</b> | <b>Fisik Total</b> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| 8.01.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | 1.422.712         | 0                      | 0,00                      | 0,00               |
| 8.01.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                 | 238.500           | 0                      | 0,00                      | 0,00               |
| 8.01.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                      | 481.404           | 0                      | 0,00                      | 0,00               |
| 8.01.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                    | 481.404           | 0                      | 0,00                      | 0,00               |
| 8.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | 221.404           | 0                      | 0,00                      | 0,00               |
| 8.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | 2.431.096.178     | 487.712.506            | 20,06                     | 49,81              |
| 8.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | 2.386.618         | 0                      | 0,00                      | 95,36              |
| 8.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | 720.367.398       | 114.954.815            | 15,96                     | 47,48              |
| 8.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | 131.635.120       | 1.945.400              | 1,48                      | 28,78              |
| 8.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 1.339.889.294     | 370.812.291            | 27,67                     | 61,84              |
| 8.01.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | 1.521.404         | 0                      | 0,00                      | 0,00               |
| 8.01.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 235.296.344       | 0                      | 0,00                      | 0,00               |
| 8.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | 3.046.988.254     | 0                      | 0,00                      | 78,37              |
| 8.01.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | 2.881.793.386     | 0                      | 0,00                      | 80,00              |
| 8.01.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                        | 165.194.868       | 0                      | 0,00                      | 49,93              |

| Kode              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                      | Pagu Total  | Realisasi Total | Realisasi Keuangan | Fisik Total |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|
| 8.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 812.181.196 | 404.716.926     | 49,83              | 55,58       |
| 8.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 20.034.000  | 0               | 0,00               | 99,83       |
| 8.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 161.247.120 | 43.297.815      | 26,85              | 56,55       |
| 8.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 630.900.076 | 361.419.111     | 57,29              | 53,92       |
| 8.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 346.930.999 | 58.114.535      | 16,75              | 36,62       |
| 8.01.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 72.741.999  | 19.419.757      | 26,70              | 50,69       |
| 8.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 154.939.000 | 33.819.778      | 21,83              | 50,00       |
| 8.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 25.400.000  | 4.875.000       | 19,19              | 50,00       |
| 8.01.01.1.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                     | 93.850.000  | 0               | 0,00               | 0,00        |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Secara garis besar capaian kinerja pelayanan SKPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025  
Provinsi Kalimantan Timur

| Tujuan                                                                                                  | Sasaran                                                                              | Indikator                                     | Satuan          | Target | Realisasi | Capaian |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|
| Tujuan 1:<br>Terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur yang demokratis                                    |                                                                                      | Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur   | Indeks          | 81.15  | 0         | 0.00    |
|                                                                                                         | Sasaran 1:<br>Meningkatnya partisipasi politik masyarakat                            | Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi            | Indeks          | 78.1   | 0         | 0.00    |
|                                                                                                         | Sasaran 2:<br>Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat                         | Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud           | Potensi Konflik | 90     | 30        | 156.67  |
| Tujuan 2:<br>Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas |                                                                                      | Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah  | Indeks          | 85     | 0         |         |
|                                                                                                         |                                                                                      | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | Poin            | 78,5   | 0         |         |
|                                                                                                         | Sasaran 3:<br>Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah   | Indeks          | 75.5   | 85.74     | 113.56  |
|                                                                                                         |                                                                                      | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah  | Poin            | 68.5   | 72.95     | 106.50  |

| PROGRAM                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                      | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                          | Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif                                                      | 33,58  | 33,04     | 98,39   |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                               | Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama | 100    | 71,43     | 71,43   |
| PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                           | Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan             | 100    | 33,33     | 33,33   |
| PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                             | Persentase potensi konflik sosial yang ditangani                                                               | 100    | 100       | 100     |
| PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik          | 1,32   | 0,03      | 2,27    |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                  | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan                                                                        | 78,68  | 47,09     | 59,85   |
|                                                                                                                                        | Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti                                                                        | 100    | 100       | 100     |

### **2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026, antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi yang berpengaruh terhadap optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Partisipasi politik masyarakat yang belum merata, terutama pada kelompok rentan, generasi muda, serta wilayah dengan akses informasi yang terbatas.
3. Masih rendahnya literasi kebangsaan terkait empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) khususnya di kalangan pemuda, pelajar, dan mahasiswa.
4. Menurunnya apresiasi terhadap nilai-nilai seni, budaya, dan kearifan lokal, yang berdampak pada melemahnya kohesi sosial dan identitas kebangsaan.
5. Peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan yang belum optimal, baik dalam pembinaan demokrasi, partisipasi masyarakat, maupun kontribusi pada pembangunan daerah.
6. Meningkatnya potensi konflik sosial yang dipicu oleh isu politik pasca-Pemilu/Pilkada 2024, kesenjangan sosial-ekonomi, permasalahan sumber daya alam, serta pengaruh disinformasi dan ujaran kebencian di ruang digital.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD**

Hasil review terhadap Ranwal RKPD dan hasil Analisa kebutuhan pelaksanaan tahun 2026, dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.4.1.  
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026  
Provinsi Kalimantan Timur

| Kode                | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                   | RKPD 2026     |               |                        | Hasil Analisis Kebutuhan |               |                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|
|                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Satuan        | Target        | Pagu                   | Satuan                   | Target        | Pagu                   |
| 1                   | 2                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                   | 4             | 5             | 6                      | 7                        | 8             | 9                      |
| <b>8</b>            | <b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                     |               |               | <b>155,160,386,000</b> |                          |               | <b>158,074,886,000</b> |
| <b>8.01.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                                          | <b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>                                                                                                      | <b>Indeks</b> | <b>78.72</b>  | <b>13,699,998,754</b>  | <b>Indeks</b>            | <b>78.72</b>  | <b>13,699,998,754</b>  |
|                     |                                                                                                                                       | <b>Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti</b>                                                                                                      | <b>%</b>      | <b>100.00</b> | <b>1,439,317,768</b>   | <b>%</b>                 | <b>100.00</b> | <b>1,439,317,768</b>   |
| <b>8.0.01.1.01</b>  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                               | <b>Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu</b>                                                                  | <b>%</b>      | <b>100.00</b> | <b>250,860,740</b>     | <b>%</b>                 | <b>100.00</b> | <b>250,860,740</b>     |
| 8.01.01.1.01.0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                         | Dokumen       | 6.00          | 24,973,200.00          | Dokumen                  | 6.00          | 24,973,200.00          |
| 8.01.01.1.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                    | Laporan       | 4.00          | 141,333,160.00         | Laporan                  | 4.00          | 141,333,160.00         |
| 8.01.01.1.01.0009   | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Berita Acara  | 1.00          | 84,554,380.00          | Berita Acara             | 1.00          | 84,554,380.00          |
| <b>8.01.01.1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                         | <b>Persentase realisasi anggaran</b>                                                                                                                | <b>%</b>      | <b>97.00</b>  | <b>12,634,477,964</b>  | <b>%</b>                 | <b>97.00</b>  | <b>12,634,477,964</b>  |
| 8.01.01.1.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   | Orang / Bulan | 49.00         | 12,206,950,364.00      | Orang / Bulan            | 49.00         | 12,206,950,364.00      |

| Kode                | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                | RKPD 2026 |              |                    | Hasil Analisis Kebutuhan |              |                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------------|--------------|--------------------|
|                     |                                                                               |                                                                                                                                                  | Satuan    | Target       | Pagu               | Satuan                   | Target       | Pagu               |
| 1                   | 2                                                                             | 3                                                                                                                                                | 4         | 5            | 6                  | 7                        | 8            | 9                  |
| 8.01.01.1.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                              | Dokumen   | 100.00       | 426,386,400.00     | Dokumen                  | 100.00       | 426,386,400.00     |
| 8.01.01.1.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan   | 12.00        | 1,141,200.00       | Laporan                  | 12.00        | 1,141,200.00       |
| <b>8.01.01.1.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | <b>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</b>                                                                         | <b>%</b>  | <b>40.00</b> | <b>733,076,600</b> | <b>%</b>                 | <b>40.00</b> | <b>733,076,600</b> |
| 8.01.01.1.03.0005   | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD             | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                 | Laporan   | 4.00         | 1,264,400.00       | Laporan                  | 4.00         | 1,264,400.00       |
| 8.01.01.1.03.0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                       | Laporan   | 2.00         | 731,812,200.00     | Laporan                  | 2.00         | 731,812,200.00     |
| <b>8.01.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | <b>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan</b>                                                                           | <b>%</b>  | <b>35.00</b> | <b>81,583,450</b>  | <b>%</b>                 | <b>35.00</b> | <b>81,583,450</b>  |
| 8.01.01.1.05.0002   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                           | Paket     | 50.00        | 54,196,850.00      | Paket                    | 1.00         | 54,196,850.00      |
| 8.01.01.1.05.0005   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                           | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                               | Dokumen   | 1.00         | 2,074,400.00       | Dokumen                  | 1.00         | 2,074,400.00       |
| 8.01.01.1.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                              | Orang     | 5.00         | 25,312,200.00      | Orang                    | 5.00         | 25,312,200.00      |

| Kode                | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                      | Indikator Kinerja                                                                      | RKPD 2026 |               |                      | Hasil Analisis Kebutuhan |               |                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|--------------------------|---------------|----------------------|
|                     |                                                                         |                                                                                        | Satuan    | Target        | Pagu                 | Satuan                   | Target        | Pagu                 |
| 1                   | 2                                                                       | 3                                                                                      | 4         | 5             | 6                    | 7                        | 8             | 9                    |
| <b>8.01.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase pelaksanaan administrasi umum</b>                                        | <b>%</b>  | <b>97.00</b>  | <b>1,060,996,468</b> | <b>%</b>                 | <b>97.00</b>  | <b>1,060,996,468</b> |
| 8.01.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | Paket     | 9.00          | 85,992,065.00        | Paket                    | 9.00          | 85,992,065.00        |
| 8.01.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                               | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | Paket     | 1.00          | 56,990,630.00        | Paket                    | 1.00          | 56,990,630.00        |
| 8.01.01.1.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | Dokumen   | 1.00          | 11,880,000.00        | Dokumen                  | 1.00          | 11,880,000.00        |
| 8.01.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Laporan   | 6.00          | 871,196,238.00       | Laporan                  | 6.00          | 871,196,238.00       |
| 8.01.01.1.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Dokumen   | 1.00          | 34,937,535.00        | Dokumen                  | 1.00          | 34,937,535.00        |
| <b>8.01.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan</b>                                    | <b>%</b>  | <b>100.00</b> | <b>27,397,200</b>    | <b>%</b>                 | <b>100.00</b> | <b>27,397,200</b>    |
| 8.01.01.1.07.0002   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | Unit      | 1.00          | 56,100.00            | Unit                     | 1.00          | 56,100.00            |
| 8.01.01.1.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                         | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | Paket     | 1.00          | 27,341,100.00        | Paket                    | 1.00          | 27,341,100.00        |
| <b>8.01.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                | <b>%</b>  | <b>100.00</b> | <b>135,152,000</b>   | <b>%</b>                 | <b>100.00</b> | <b>135,152,000</b>   |
| 8.01.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Laporan   | 1.00          | 20,000,000.00        | Laporan                  | 1.00          | 20,000,000.00        |
| 8.01.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan   | 12.00         | 114,030,000.00       | Laporan                  | 12.00         | 114,030,000.00       |

| Kode                  | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                         | RKPD 2026           |                    |                      | Hasil Analisis Kebutuhan |                    |                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|
|                       |                                                                                                                    |                                                                                                           | Satuan              | Target             | Pagu                 | Satuan                   | Target             | Pagu                 |
| 1                     | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                         | 4                   | 5                  | 6                    | 7                        | 8                  | 9                    |
| 8.01.01.1.08.000<br>4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | Laporan             | 1.00               | 1,122,000.00         | Laporan                  | 1.00               | 1,122,000.00         |
| <b>8.01.01.1.09</b>   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>                                                    | <b>%</b>            | <b>100.0<br/>0</b> | <b>215,772,100</b>   | <b>%</b>                 | <b>100.0<br/>0</b> | <b>215,772,100</b>   |
| 8.01.01.1.09.000<br>1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya    | Unit                | 1.00               | 41,726,000.00        | Unit                     | 1.00               | 41,726,000.00        |
| 8.01.01.1.09.000<br>2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya    | Unit                | 10.00              | 136,090,000.00       | Unit                     | 10.00              | 136,090,000.00       |
| 8.01.01.1.09.000<br>6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                        | Unit                | 60.00              | 25,400,000.00        | Unit                     | 60.00              | 25,400,000.00        |
| 8.01.01.1.09.000<br>8 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                     | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                                  | Unit                | 2.00               | 12,556,100.00        | Unit                     | 2.00               | 12,556,100.00        |
| <b>8.01.02</b>        | <b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>                                                | <b>Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan</b> | <b>%</b>            | <b>100.0<br/>0</b> | <b>4,292,461,704</b> | <b>%</b>                 | <b>100.0<br/>0</b> | <b>5,291,461,704</b> |
| <b>8.01.02.1.01</b>   | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang</b>                                                | <b>Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>       | <b>Dokume<br/>n</b> | <b>2.00</b>        | <b>4,292,461,704</b> | <b>Dokume<br/>n</b>      | <b>2.00</b>        | <b>5,291,461,704</b> |

| Kode              | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                   | RKPD 2026 |        |                  | Hasil Analisis Kebutuhan |        |                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|--------------------------|--------|------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     | Satuan    | Target | Pagu             | Satuan                   | Target | Pagu             |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | 5      | 6                | 7                        | 8      | 9                |
|                   | <b>Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |                  |                          |        |                  |
| 8.01.02.1.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                             | Orang     | 500.00 | 1,274,623,794.00 | Orang                    | 800.00 | 1,607,623,794.00 |
| 8.01.02.1.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                            | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                        | Laporan   | 4.00   | 280,048,800.00   | Laporan                  | 4.00   | 280,048,800.00   |
| 8.01.02.1.01.0006 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Dokumen   | 1.00   | 37,579,310.00    | Dokumen                  | 1.00   | 37,579,310.00    |
| 8.01.02.1.01.0008 | Pembinaan terhadap aktivitas                                                                                                                                                                                   | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan                                                                                                                                                                        | Dokumen   | 1.00   | 601,236,600.00   | Dokumen                  | 1.00   | 934,236,600.00   |

| Kode              | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                            | RKPD 2026      |             |                        | Hasil Analisis Kebutuhan |             |                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              | Satuan         | Target      | Pagu                   | Satuan                   | Target      | Pagu                   |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                            | 4              | 5           | 6                      | 7                        | 8           | 9                      |
|                   | kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka                                                                                                                                                                                                                                                     | Hasil Pembinaan Purnapaskibraka                                                                              |                |             |                        |                          |             |                        |
| 8.01.02.1.01.0009 | Pelaksanaan tugas Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka                                                                  | Dokumen        | 1.00        | 1,684,736,600.00       | Dokumen                  | 1.00        | 1,684,736,600.00       |
| 8.01.02.1.01.0012 | Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Paskibraka                                                                                            | Orang          | 40.00       | 414,236,600.00         | Orang                    | 40.00       | 747,236,600.00         |
| 8.01.03           | <b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>                                                                                                                                          | <b>Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik</b> | <b>%</b>       | <b>1.00</b> | <b>122,842,148,590</b> | <b>%</b>                 | <b>1.00</b> | <b>123,341,648,590</b> |
| 8.01.03.1.01      | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b> | <b>Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis</b>              | <b>Dokumen</b> | <b>2.00</b> | <b>122,842,148,590</b> | <b>Dokumen</b>           | <b>2.00</b> | <b>123,341,648,590</b> |
| 8.01.03.1.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya                 | Orang          | 500.00      | 122,561,705,340.00     | Orang                    | 500.00      | 123,061,205,340.00     |

| Kode              | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                              | RKPD 2026      |        |                | Hasil Analisis Kebutuhan |        |                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------------------------|--------|----------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Satuan         | Target | Pagu           | Satuan                   | Target | Pagu           |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4              | 5      | 6              | 7                        | 8      | 9              |
|                   | Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                                                                                           | Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                                                                                                    |                |        |                |                          |        |                |
| 8.01.03.1.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Laporan        | 4.00   | 280,443,250.00 | Laporan                  | 4.00   | 280,443,250.00 |
| 8.01.04           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif</b>                                                                                                                                                                                                                               | %              | 79.00  | 3,600,889,923  | %                        | 79.00  | 3,933,889,923  |
| 8.01.04.1.01      | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Dokumen</b> | 3.00   | 3,600,889,923  | <b>Dokumen</b>           | 3.00   | 3,933,889,923  |

| Kode                | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                      | RKPD 2026      |               |                      | Hasil Analisis Kebutuhan |               |                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------|---------------|----------------------|
|                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        | Satuan         | Target        | Pagu                 | Satuan                   | Target        | Pagu                 |
| 1                   | 2                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                      | 4              | 5             | 6                    | 7                        | 8             | 9                    |
|                     | <b>Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                |               |                      |                          |               |                      |
| 8.01.04.1.01.0003   | Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah      | Orang          | 300.00        | 3,505,698,423.00     | Orang                    | 300.00        | 3,838,698,423.00     |
| 8.01.04.1.01.0005   | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Laporan        | 4.00          | 95,191,500.00        | Laporan                  | 4.00          | 95,191,500.00        |
| <b>8.01.05</b>      | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>                                                                                               | <b>Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama</b>                                                                  | <b>%</b>       | <b>100.00</b> | <b>1,224,576,613</b> | <b>%</b>                 | <b>100.00</b> | <b>1,974,576,613</b> |
| <b>8.01.05.1.01</b> | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>                                                                      | <b>Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>                                                                                          | <b>Dokumen</b> | <b>1.00</b>   | <b>1,224,576,613</b> | <b>Dokumen</b>           | <b>1.00</b>   | <b>1,974,576,613</b> |
| 8.01.05.1.01.0003   | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan                                                                                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang                                                                                                                            | Orang          | 3.00          | 1,163,265,613.00     | Orang                    | 3.00          | 1,913,265,613.00     |

| Kode              | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                           | RKPD 2026 |        |               | Hasil Analisis Kebutuhan |        |               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------|--------|---------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             | Satuan    | Target | Pagu          | Satuan                   | Target | Pagu          |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4         | 5      | 6             | 7                        | 8      | 9             |
|                   | Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                    | Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                   |           |        |               |                          |        |               |
| 8.01.05.1.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Laporan   | 4.00   | 61,311,000.00 | Laporan                  | 4.00   | 61,311,000.00 |
| 8.01.06           | <b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>                                                                                                  | <b>Persentase potensi konflik sosial yang ditangani</b>                                                                                                                                                                     | %         | 100.00 | 8,060,992,648 | %                        | 100.00 | 8,393,992,648 |
| 8.01.06.1.01      | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional</b>                                                                                                                                  | <b>Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>                                                                                                                | Dokumen   | 3.00   | 8,060,992,648 | Dokumen                  | 3.00   | 8,393,992,648 |

| Kode                  | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                          | RKPD 2026 |        |                  | Hasil Analisis Kebutuhan |        |                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|--------------------------|--------|------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Satuan    | Target | Pagu             | Satuan                   | Target | Pagu             |
| 1                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4         | 5      | 6                | 7                        | 8      | 9                |
|                       | <b>dan Penanganan Konflik Sosial</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |        |                  |                          |        |                  |
| 8.01.06.1.01.000<br>3 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah       | Orang     | 500.00 | 1,135,872,648.00 | Orang                    | 500.00 | 1,468,872,648.00 |
| 8.01.06.1.01.000<br>5 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Laporan   | 4.00   | 180,220,000.00   | Laporan                  | 4.00   | 180,220,000.00   |
| 8.01.06.1.01.000<br>6 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                 | Dokumen   | 1.00   | 6,744,900,000.00 | Dokumen                  | 1.00   | 6,744,900,000.00 |

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Pemangku Kepentingan**

Penelaahan usulan program dan kegiatan pemangku kepentingan dapat dijelaskan dari tabel berikut

Tabel 2.5.1  
Usulan Program dan Kegiatan Pemangku Kepentingan  
Provinsi Kalimantan Timur

| NO | NAMA PEMOHON                                                   | MAKSUD USULAN                                                                                                                                                | JUMLAH USULAN<br>SETELAH VERIFIKASI |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur   | Pengadaan ETLE                                                                                                                                               | 50.000.000.000                      |
| 2  | Kodam VI/Mulawarman                                            | Pengadaan Almatsus Penanggulangan Bencana Alam                                                                                                               | 40.000.000.000                      |
| 3  | Komando Resor Militer 091 / ASN                                | Peningkatan Jalan dan Drainase, serta Renovasi Berat Asrama Type-K                                                                                           | 7.000.000.000                       |
| 4  | Komando Operasi TNI Angkatan Udara II Pangkalan TNI AU Dhomber | Renovasi Berat Markas Komando Lanud Dhomber dan Overlay Jalan Komplek Lanud Dhomber                                                                          | 10.000.000.000                      |
| 5  | Korps Brimob Polri Pasukan Brimob II                           | Pengadaan Sarpras                                                                                                                                            | 5.000.000.000                       |
| 6  | Yayasan Kutim Action Center                                    | Program dan Kegiatan Organisasi                                                                                                                              | 150.000.000                         |
| 7  | Yayasan Inovasi Membangun Bontang                              | Pentingnya meningkatkan partisipasi dan pemahaman generasi muda dalam politik dan demokrasi , Jl. A. Yani (Panahan) RT. 11 No. 45, Provinsi Kalimantan Timur | 190.000.000                         |
| 8  | IMASKAB TA 2026                                                | Pengajuan bantuan Hibah Dana Kegiatan Operasional Organisasi                                                                                                 | 100.000.000                         |
| 9  | Hibah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia                 | Program dan Kegiatan Organisasi                                                                                                                              | 190.000.000                         |
| 10 | Wanita Ikatan Toraja Balikpapan                                | Program dan Kegiatan Organisasi (Seminar)                                                                                                                    | 150.000.000                         |
| 11 | Lembaga Mitra Pemuda Kutai                                     | Program dan Kegiatan Organisasi                                                                                                                              | 240.000.000                         |

| NO | NAMA PEMOHON                                                       | MAKSUD USULAN                                                                          | JUMLAH USULAN<br>SETELAH VERIFIKASI |
|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 12 | PAGUYUBAN<br>KELUARGA<br>BOJONEGORO<br>BONTANG<br>(PAKUGORO)       | Program dan<br>Kegiatan Organisasi                                                     | 190.000.000                         |
| 13 | PAGUYUBAN<br>WAROK PONOROGO<br>PERANTAUAN<br>CABANG KUTAI<br>TIMUR | Program dan<br>Kegiatan Organisasi                                                     | 100.000.000                         |
| 14 | BANK SAMPAH<br>KANAL TIGA                                          | Program dan<br>Kegiatan Organisasi                                                     | 90.000.000                          |
| 15 | PW MUSLIMAT<br>NAHDLATUL ULAMA<br>KALIMANTAN<br>TIMUR              | Program dan<br>Kegiatan Organisasi                                                     | 190.000.000                         |
| 16 | IKATAN JAM'IYYAH<br>TOKOH AGAMA<br>DAN MASYARAKAT<br>(IJ'TAMA)     | Program dan<br>Kegiatan Organisasi                                                     | 50.000.000                          |
| 17 | Komunitas Peduli<br>Kemanusiaan dan<br>Sosial Indonesia            | Program dan<br>Kegiatan Organisasi                                                     | 100.000.000                         |
| 18 | Paguyuban Keluarga<br>Besar Banyuwangi<br>(PKBB)                   | Program dan<br>Kegiatan Organisasi                                                     | 150.000.000                         |
| 19 | IKATAN<br>MAHASISWA<br>MUHAMMADIYAH                                | Program dan<br>Kegiatan Organisasi                                                     | 200.000.000                         |
| 20 | Mitra Iswara                                                       | Perlunya Pendidikan<br>Politik dan<br>Demokrasi Bagi<br>Masyarakat<br>Kalimantan Timur | 100.000.000                         |
| 21 | PC MUSLIMAT NU<br>KUTAI<br>KARTANEGARA                             | Pengadaan<br>Kendaraan (Mobil)                                                         | 250.000.000                         |
| 22 | Persatuan Tuna<br>Netra Indonesia                                  | Program dan<br>Kegiatan Organisasi                                                     | 83.000.000                          |
| 23 | DPP<br>IKAPAKARTI KALTIM                                           | Program dan<br>Kegiatan Organisasi                                                     | 500.000.000                         |

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

---

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta pencapaian sasaran pembangunan nasional, pemerintah periode 2025–2029 telah menetapkan arah pembangunan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

PJMN 2025–2029 merupakan tahapan awal implementasi RPJPN 2025–2045 yang menitikberatkan pada pembangunan fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Visi pembangunan lima tahunan tersebut adalah:

**Visi:** “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

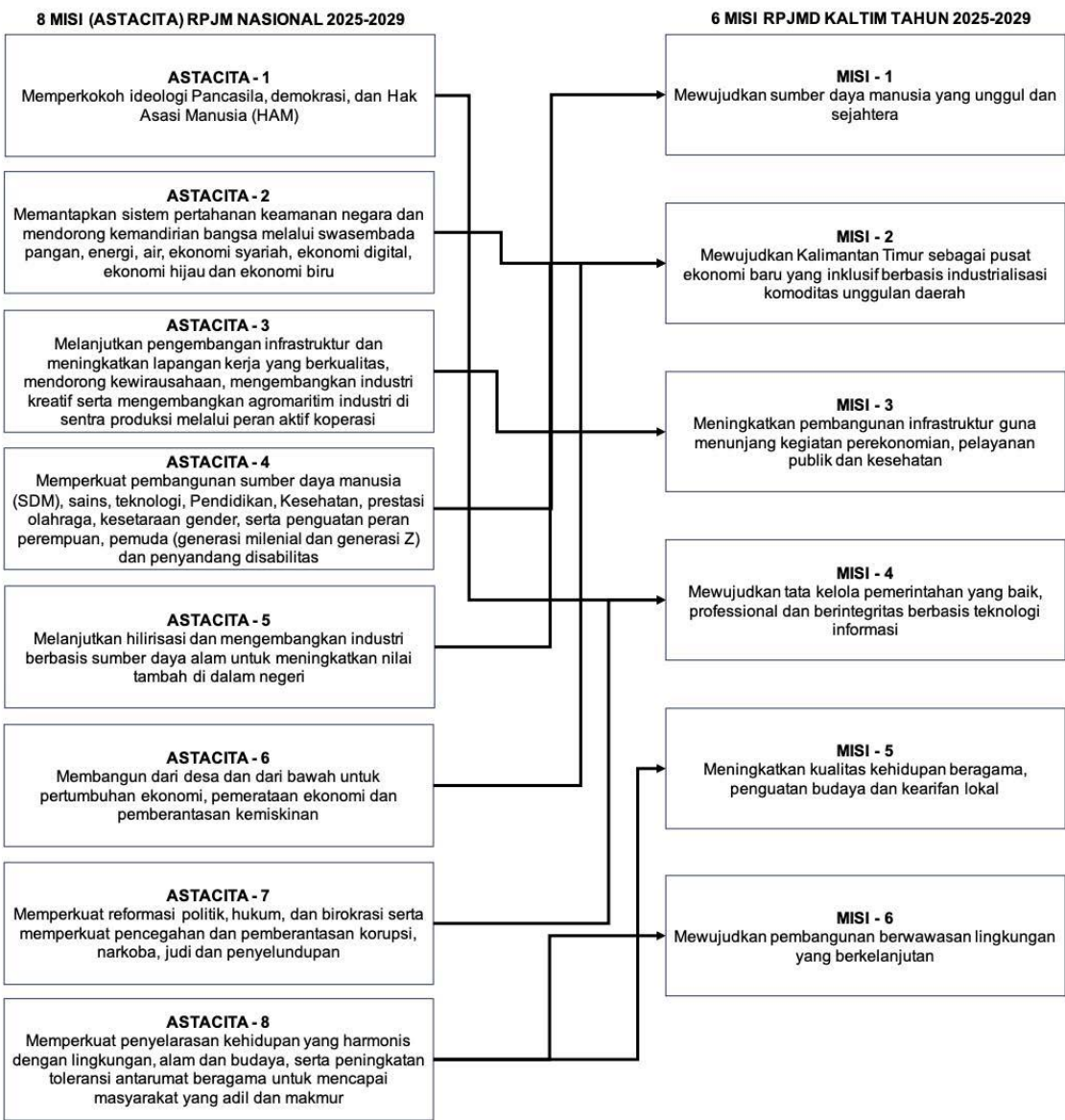
#### **Misi / Arah Kebijakan Nasional (“Asta Cita”):**

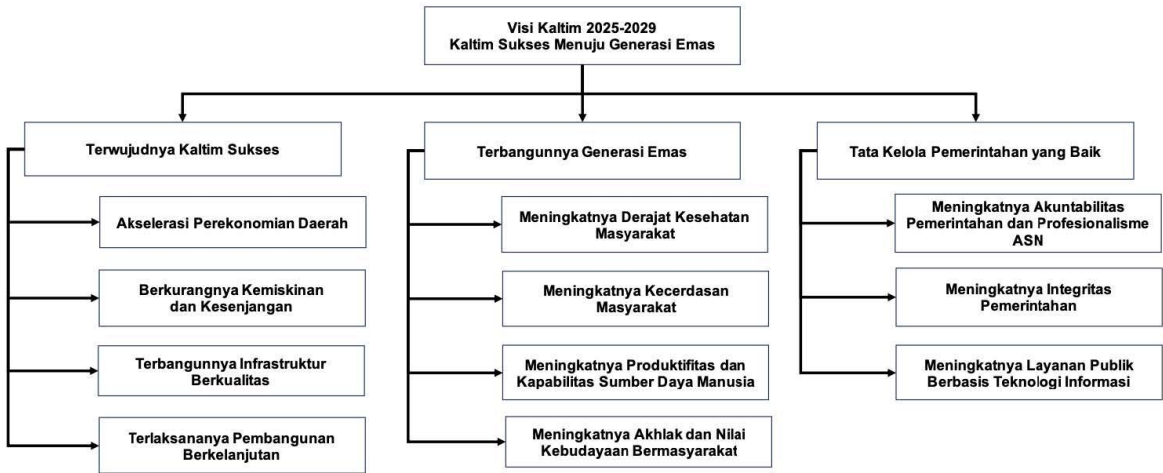
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
2. Memantapkan pertahanan, keamanan, dan kemandirian nasional, termasuk swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi hijau dan biru.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas lapangan kerja, kewirausahaan, serta pembangunan infrastruktur strategis.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial di seluruh wilayah.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat, produktif, serta berdaya saing global.
6. Memajukan kebudayaan nasional, memperkuat identitas bangsa, dan melestarikan nilai-nilai luhur serta kearifan lokal.
7. Menegakkan sistem hukum yang profesional, independen, dan terpercaya serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
8. Memperkuat diplomasi dan kerja sama internasional untuk mendukung kepentingan nasional dan stabilitas kawasan.

Arah kebijakan nasional tersebut menjadi landasan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 dan diturunkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, guna memastikan konsistensi, keterpaduan, dan sinergi antara pusat dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional jangka menengah maupun jangka panjang.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD

Sesuai Rencana Strategis 2025-2029 telah tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu kepada Rancangan Awal RPJMD 2025-2029, maka tujuan yang hendak dicapai, yaitu Tujuan 2: Terbangunnya Generasi Emas dan Tujuan 3: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik





Tabel 3.2.1.  
Tujuan RPD 2024-2026 yang menjadi acuan

| TUJUAN                            |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Uraian                            | Indikator                  |
| Terbangunnya Generasi Emas        | Indeks Modal Manusia       |
| Tata Kelola Pemrintahan yang Baik | Indeks Reformasi Birokrasi |

Berdasarkan tujuan 1 RPJMD 2025-2029 yang telah ditentukan maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada sasaran **Sasaran 8: Meningkatnya Akhlak dan Nilai Kebudayaan Masyarakat** dan **Sasaran 9: Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme ASN**

Tabel 3.2.2.  
Sasaran RPD 2024 - 2026 yang menjadi acuan

| Sasaran                                                         |                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Uraian                                                          | Indikator                      |
| Meningkatnya Akhlak dan Nilai Kebudayaan Masyarakat             | Indeks Kerukunan Umat Beragama |
|                                                                 | Indeks Pembangunan Kebudayaan  |
| Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme ASN | Nilai AKIP                     |
|                                                                 | Indeks Inovasi Daerah          |
|                                                                 | Sistem Merit                   |
|                                                                 | Indeks Pengelolaan Aset        |

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 yang menjadi acuan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat terlihat pada Tabel 3.2.3. berikut:

**Tabel 3.2.3.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

| NSPK dan Sasaran RPJMD                                                     | Tujuan                                                                                                 | Sasaran                                                                                                         | Indikator                                          | Target Tahun |       |       |       |       |       | Ket. |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                    | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |      |
| (1)                                                                        | (2)                                                                                                    | (3)                                                                                                             | (4)                                                | (5)          | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   | (10)  | (11) |
| <b>Sasaran 8:</b><br>Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat | <b>Tujuan 1</b><br>Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM |                                                                                                                 | Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur        | 82,30        | 82,32 | 82,34 | 82,36 | 82,38 | 82,40 |      |
|                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                                 | Indeks Kerukunan Umat Beragama                     | 78,30        | 78,40 | 78,50 | 78,60 | 78,70 | 78,80 |      |
|                                                                            |                                                                                                        | <b>Sasaran 1</b><br>Terjaganya harmonisasi di masyarakat                                                        | Indeks Harmoni Indonesia di Kalimantan Timur       | 6,87         | 6,89  | 6,91  | 6,93  | 6,95  | 6,97  |      |
|                                                                            |                                                                                                        | <b>Sasaran 2</b><br>Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Organisasi Masyarakat                          | Indeks Kinerja Ormas                               | 67           | 68    | 69    | 70    | 71    | 72    |      |
|                                                                            |                                                                                                        | <b>Sasaran 3</b><br>Meningkatnya kesadaran dalam penerapan etika dan budaya politik dalam kehidupan sehari-hari | Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Lembaga Demokrasi | 83,02        | 83,04 | 83,06 | 83,08 | 83,10 | 83,12 |      |

### 3.3 Program dan Kegiatan

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka pada Tahun Anggaran 2026 terdapat 6 Program, 13 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dengan total pagu Rp 155.160.386.000,00.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 3) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
    - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - 2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
    - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
    - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - 5) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
  - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - 2) Pengadaan Mebel
  - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - 4) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
    - 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
    - 2) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

- 3) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
  - 4) Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
  - 5) Pelaksanaan tugas Paskibraka
  - 6) Pembentukan Paskibraka
3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
    - 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
    - 2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- 1) Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
  - 2) Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
  - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
    - 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
    - 2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
  - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
    - 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
    - 2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

- 3) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah  
Provinsi

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

---

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur. Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

Tabel 4.1.  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026  
dan Perkiraan Maju Tahun 2027  
Provinsi Kalimantan Timur

| Kode                | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                   | RKPD 2026     |               |                        | Perkiraan 2027 |                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|----------------|-----------------------|
|                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Satuan        | Target        | Pagu                   | Target         | Pagu                  |
| 1                   | 2                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                   | 4             | 5             | 6                      | 10             | 11                    |
| <b>8</b>            | <b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                     |               |               | <b>155.160.386.000</b> |                | <b>43.051.886.000</b> |
| <b>8.01.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                                          | <b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>                                                                                                      | <b>Indeks</b> | <b>78,72</b>  | <b>13.699.998.754</b>  | <b>78,72</b>   | <b>13.699.998.754</b> |
|                     |                                                                                                                                       | <b>Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti</b>                                                                                                      | <b>%</b>      | <b>100,00</b> | <b>1.439.317.768</b>   | <b>100,00</b>  | <b>1.439.317.768</b>  |
| <b>8.0.01.1.01</b>  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                               | <b>Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu</b>                                                                  | <b>%</b>      | <b>100,00</b> | <b>250.860.740</b>     | <b>100,00</b>  | <b>250.860.740</b>    |
| 8.01.01.1.01.0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                         | Dokumen       | 6,00          | 24.973.200,00          | 6,00           | 24.973.200,00         |
| 8.01.01.1.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                    | Laporan       | 4,00          | 141.333.160,00         | 4,00           | 141.333.160,00        |
| 8.01.01.1.01.0009   | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Berita Acara  | 1,00          | 84.554.380,00          | 1,00           | 84.554.380,00         |
| <b>8.01.01.1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                         | <b>Persentase realisasi anggaran</b>                                                                                                                | <b>%</b>      | <b>97,00</b>  | <b>12.634.477.964</b>  | <b>97,00</b>   | <b>12.634.477.964</b> |
| 8.01.01.1.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   | Orang / Bulan | 49,00         | 12.206.950.364,00      | 49,00          | 12.206.950.364,00     |
| 8.01.01.1.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                 | Dokumen       | 100,00        | 426.386.400,00         | 100,00         | 426.386.400,00        |

| Kode                | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                 | RKPD 2026 |              |                      | Perkiraan 2027 |                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|----------------|----------------------|
|                     |                                                                                |                                                                                                                                                   | Satuan    | Target       | Pagu                 | Target         | Pagu                 |
| 8.01.01.1.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan   | 12,00        | 1.141.200,00         | 12,00          | 1.141.200,00         |
| <b>8.01.01.1.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  | <b>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</b>                                                                          | <b>%</b>  | <b>40,00</b> | <b>733.076.600</b>   | <b>40,00</b>   | <b>733.076.600</b>   |
| 8.01.01.1.03.0005   | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD              | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                  | Laporan   | 4,00         | 1.264.400,00         | 4,00           | 1.264.400,00         |
| 8.01.01.1.03.0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                        | Laporan   | 2,00         | 731.812.200,00       | 2,00           | 731.812.200,00       |
| <b>8.01.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan</b>                                                                            | <b>%</b>  | <b>35,00</b> | <b>81.583.450</b>    | <b>35,00</b>   | <b>81.583.450</b>    |
| 8.01.01.1.05.0002   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            | Paket     | 50,00        | 54.196.850,00        | 1,00           | 54.196.850,00        |
| 8.01.01.1.05.0005   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                | Dokumen   | 1,00         | 2.074.400,00         | 1,00           | 2.074.400,00         |
| 8.01.01.1.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               | Orang     | 5,00         | 25.312.200,00        | 5,00           | 25.312.200,00        |
| <b>8.01.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Persentase pelaksanaan administrasi umum</b>                                                                                                   | <b>%</b>  | <b>97,00</b> | <b>1.060.996.468</b> | <b>97,00</b>   | <b>1.060.996.468</b> |
| 8.01.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                    | Paket     | 9,00         | 85.992.065,00        | 9,00           | 85.992.065,00        |
| 8.01.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                         | Paket     | 1,00         | 56.990.630,00        | 1,00           | 56.990.630,00        |
| 8.01.01.1.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                       | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                      | Dokumen   | 1,00         | 11.880.000,00        | 1,00           | 11.880.000,00        |

| Kode                | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                      | RKPD 2026 |               |                    | Perkiraan 2027 |                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|
|                     |                                                                                                                    |                                                                                                        | Satuan    | Target        | Pagu               | Target         | Pagu               |
| 8.01.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | Laporan   | 6,00          | 871.196.238,00     | 6,00           | 871.196.238,00     |
| 8.01.01.1.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | Dokumen   | 1,00          | 34.937.535,00      | 1,00           | 34.937.535,00      |
| <b>8.01.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan</b>                                                    | <b>%</b>  | <b>100,00</b> | <b>27.397.200</b>  | <b>100,00</b>  | <b>27.397.200</b>  |
| 8.01.01.1.07.0002   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | Unit      | 1,00          | 56.100,00          | 1,00           | 56.100,00          |
| 8.01.01.1.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | Paket     | 1,00          | 27.341.100,00      | 1,00           | 27.341.100,00      |
| <b>8.01.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                                | <b>%</b>  | <b>100,00</b> | <b>135.152.000</b> | <b>100,00</b>  | <b>135.152.000</b> |
| 8.01.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | Laporan   | 1,00          | 20.000.000,00      | 1,00           | 20.000.000,00      |
| 8.01.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Laporan   | 12,00         | 114.030.000,00     | 12,00          | 114.030.000,00     |
| 8.01.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Laporan   | 1,00          | 1.122.000,00       | 1,00           | 1.122.000,00       |
| <b>8.01.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>                                                 | <b>%</b>  | <b>100,00</b> | <b>215.772.100</b> | <b>100,00</b>  | <b>215.772.100</b> |
| 8.01.01.1.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Unit      | 1,00          | 41.726.000,00      | 1,00           | 41.726.000,00      |

| Kode                | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                            | RKPD 2026      |               |                      | Perkiraan 2027 |                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              | Satuan         | Target        | Pagu                 | Target         | Pagu                 |
| 8.01.01.1.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                       | Unit           | 10,00         | 136.090.000,00       | 10,00          | 136.090.000,00       |
| 8.01.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                           | Unit           | 60,00         | 25.400.000,00        | 60,00          | 25.400.000,00        |
| 8.01.01.1.09.0008   | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                                                                                      | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                                                                                                                     | Unit           | 2,00          | 12.556.100,00        | 2,00           | 12.556.100,00        |
| <b>8.01.02</b>      | <b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>                                                                                                                 | <b>Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan</b>                                                                                    | <b>%</b>       | <b>100,00</b> | <b>4.292.461.704</b> | <b>100,00</b>  | <b>5.291.461.704</b> |
| <b>8.01.02.1.01</b> | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>                                                                      | <b>Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>                                                                                          | <b>Dokumen</b> | <b>2,00</b>   | <b>4.292.461.704</b> | <b>2,00</b>    | <b>5.291.461.704</b> |
| 8.01.02.1.01.0003   | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan      | Orang          | 500,00        | 1.274.623.794,00     | 800,00         | 1.607.623.794,00     |
| 8.01.02.1.01.0005   | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Laporan        | 4,00          | 280.048.800,00       | 4,00           | 280.048.800,00       |
| 8.01.02.1.01.0006   | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya                                                                   | Dokumen        | 1,00          | 37.579.310,00        | 1,00           | 37.579.310,00        |

| Kode              | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                            | RKPD 2026      |             |                        | Perkiraan 2027 |                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------|----------------|-----------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Satuan         | Target      | Pagu                   | Target         | Pagu                  |
|                   | Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara                                                                                                                                                    | Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara                     |                |             |                        |                |                       |
| 8.01.02.1.01.0008 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka                                                                                                                                                                                                                        | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka                                 | Dokumen        | 1,00        | 601.236.600,00         | 1,00           | 934.236.600,00        |
| 8.01.02.1.01.0009 | Pelaksanaan tugas Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka                                                                                  | Dokumen        | 1,00        | 1.684.736.600,00       | 1,00           | 1.684.736.600,00      |
| 8.01.02.1.01.0012 | Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Paskibraka                                                                                                            | Orang          | 40,00       | 414.236.600,00         | 40,00          | 747.236.600,00        |
| 8.01.03           | <b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>                                                                                                                                          | <b>Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik</b>                 | <b>%</b>       | <b>1,00</b> | <b>122.842.148.590</b> | <b>1,00</b>    | <b>11.341.648.590</b> |
| 8.01.03.1.01      | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b> | <b>Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis</b>                              | <b>Dokumen</b> | <b>2,00</b> | <b>122.842.148.590</b> | <b>2,00</b>    | <b>11.341.648.590</b> |
| 8.01.03.1.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,                                                                                                                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, | Orang          | 500,00      | 122.561.705.340,00     | 500,00         | 11.061.205.340,00     |

| Kode                | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                              | RKPD 2026      |              |                      | Perkiraan 2027 |                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|----------------|--------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Satuan         | Target       | Pagu                 | Target         | Pagu               |
|                     | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                                                                                                                           | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                                                                                                                                    |                |              |                      |                |                    |
| 8.01.03.1.01.0005   | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Laporan        | 4,00         | 280.443.250,00       | 4,00           | 280.443.250,00     |
| <b>8.01.04</b>      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>%</b>       | <b>79,00</b> | <b>3.600.889.923</b> | <b>79,00</b>   | <b>910.889.923</b> |
| <b>8.01.04.1.01</b> | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>                                                                                                                                                             | <b>Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Dokumen</b> | <b>3,00</b>  | <b>3.600.889.923</b> | <b>3,00</b>    | <b>910.889.923</b> |
| 8.01.04.1.01.0003   | Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                              | Orang          | 300,00       | 3.505.698.423,00     | 300,00         | 815.698.423,00     |

| Kode                | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                             | RKPD 2026      |               |                      | Perkiraan 2027 |                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | Satuan         | Target        | Pagu                 | Target         | Pagu                 |
| 8.01.04.1.01.0005   | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                        | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                        | Laporan        | 4,00          | 95.191.500,00        | 4,00           | 95.191.500,00        |
| <b>8.01.05</b>      | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>                                                                                                                                      | <b>Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama</b>                                                                                                         | <b>%</b>       | <b>100,00</b> | <b>1.224.576.613</b> | <b>100,00</b>  | <b>1.974.576.613</b> |
| <b>8.01.05.1.01</b> | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>                                                                                                             | <b>Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>                                                                                                                                 | <b>Dokumen</b> | <b>1,00</b>   | <b>1.224.576.613</b> | <b>1,00</b>    | <b>1.974.576.613</b> |
| 8.01.05.1.01.0003   | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah       | Orang          | 3,00          | 1.163.265.613,00     | 3,00           | 1.913.265.613,00     |
| 8.01.05.1.01.0005   | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Laporan        | 4,00          | 61.311.000,00        | 4,00           | 61.311.000,00        |
| <b>8.01.06</b>      | <b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN</b>                                                                                                                                                      | <b>Persentase potensi konflik sosial yang ditangani</b>                                                                                                                                                                       | <b>%</b>       | <b>100,00</b> | <b>8.060.992.648</b> | <b>100,00</b>  | <b>8.393.992.648</b> |

| Kode                | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                          | RKPD 2026      |             |                      | Perkiraan 2027 |                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Satuan         | Target      | Pagu                 | Target         | Pagu                 |
|                     | <b>KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |                      |                |                      |
| <b>8.01.06.1.01</b> | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>                                                                                                                                                                   | <b>Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>                                                                                                                                                                               | <b>Dokumen</b> | <b>3,00</b> | <b>8.060.992.648</b> | <b>3,00</b>    | <b>8.393.992.648</b> |
| 8.01.06.1.01.0003   | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah       | Orang          | 500,00      | 1.135.872.648,00     | 500,00         | 1.468.872.648,00     |
| 8.01.06.1.01.0005   | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Laporan        | 4,00        | 180.220.000,00       | 4,00           | 180.220.000,00       |
| 8.01.06.1.01.0006   | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                 | Dokumen        | 1,00        | 6.744.900.000,00     | 1,00           | 6.744.900.000,00     |

## **BAB V      PENUTUP**

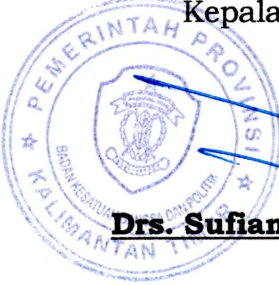
---

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah, prioritas, serta program dan kegiatan strategis untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Renstra 2025–2029, serta selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman operasional bagi seluruh jajaran Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Renja ini juga menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat terukur capaian kinerjanya serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, Rancangan Akhir Renja Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi acuan yang jelas dan terarah dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah, khususnya dalam bidang kesatuan bangsa dan politik, serta memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya Kalimantan Timur yang aman, tertib, harmonis, demokratis, dan berdaya saing.

Kepala Badan,



**Drs. Sufian Agus, M.Si.**